

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan menyajikan suatu informasi yang dibutuhkan pengguna. Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas, LKPD dapat dikatakan baik apabila mendapat opini wajar tanpa pengecualian (Putra & Halmawati, 2022).

Laporan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana APBD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan persyaratan normatif. Diperlukan pemerintah agar dapat memenuhi kualitas laporan keuangan yang diharuskannya itu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi keuangan daerah didukung oleh pemanfaatan sistem informasi akuntansi (Chairina & Wehartaty, 2019). Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan juga

dapat dijadikan alat untuk pertanggungjawaban kinerja keuangannya kepadapublik, sehingga pemerintahan harus menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Putra & Halmawati, 2022).

Kualitas informasi dalam laporan keuangan ditentukan dari seberapa baik kualitas laporan keuangan tersebut. Para pemakai laporan keuangan menggunakan informasi tersebut sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan karena informasi tersebut dipersiapkan dengan baik, telah disetujui dan diaudit secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk setiap periode akan memperoleh hasil evaluasi berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa diantaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Setiap opini yang diberikan berdasarkan atas kriteria penilaian diantaranya sistem pengendalian internal yang memadai, kesalahan salah saji material di tiap pos-pos laporan keuangan, serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (SAP).

**Tabel 1.1**  
**Tren Hasil Pemesiksaan BPK**

No.	Tahun	Hasil Pemeriksaan BPK
1.	2017	WDP
2.	2018	WDP
3.	2019	WTP
4.	2020	WTP
5.	2021	WTP

Sumber : BPK Sumut

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tren hasil pemeriksaan BPK pada Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2017 mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), begitupun pada tahun 2018 Kabupaten Padang Lawas menerima opini WDP (wajar dengan pengecualian). Sedangkan pada tahun 2019 Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan dengan mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian), begitupun pada tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Padang Lawas menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini ini diberikan atas jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, namun, Kabupaten Padang Lawas didorong untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Tahun 2021. Selain opini atas laporan keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan diantaranya, dimana pada penyusunan laporan keuangan klasifikasi penganggaran belanja daerah, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja modal dan belanja bantuan keuangan lainnya pada sejumlah OPD tidak tepat. Adanya kelebihan belanja perjalanan dinas. Kekurangan volume paket pekerjaan belanja modal. Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial tidak sesuai ketentuan. Pengelolaan dan panatausahaan asset tetap belum tertib. Permasalahan tersebut dimuat dalam iktisar hasil pemeriksaan daerah (IHPD) tahun 2021.

Fenomena di Indonesia yang terjadi dewasa ini dalam perkembangan sektor publik yaitu tuntutan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga publik, baik daerah maupun pusat yang semakin kuat. Akuntabilitas merupakan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang wajib untuk dipertanggungjawabkan melalui

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Rahmawati, 2017). Berbagai fenomena yang peneliti temukan ternyata masih banyak beberapa kelemahan di dalam laporan keuangan pemerintah di Indonesia, dari adanya fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia tersebut menarik untuk diuji atau dianalisis lebih lanjut.

BPK (2021) mengungkapkan adanya permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan pada Kabupaten Padang Lawas diantaranya, dimana pada penyusunan laporan keuangan klasifikasi penganggaran belanja daerah, belanja pegawai, belanjabantuan sosial, belanjamodal dan belanja bantuan keuanganlainnyapada sejumlah OPD tidak tepat. Adanya kelebihan belanja perjalanan dinas. Kekurangan volume paket pekerjaan belanja modal. Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial tidak sesuai ketentuan. Permasalahan lain mengenai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan pada Pemkab Padang Lawas mengenai pengelolaan dan panatausahaan asset tetap belum tertib. Mengenai sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai dimana adanya perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Permasalahan tersebut dimuat dalam iktisar hasil pemeriksaan daerah (IHPD) tahun 2021.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian laporan keuangan pemerintah dengan peraturan dan masih terdapat

penyimpangan yang ditemukan BPK (Bapan Pemeriksa Keuangan), membuat tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan audit laporan keuangan harus lebih baik (*good governance government*) meningkat, hal ini tentunya mendorong pemerintah daerah dan pusat menerapkan akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang berkualitas didukung oleh salah satu faktornya yaitu sistem informasi akuntansi, proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik maka dapat menghasilkan tiga laporan keuangan berkualitas. Informasi merupakan data yang sudah diolah yang ditujukan untuk seseorang, organisasi ataupun siapa saja yang membutuhkan. Informasi menjadi berguna apabila objek yang menerima informasi membutuhkan informasi tersebut (Mulyani dkk, 2018:14).

Sebuah organisasi dalam setiap manajemen memerlukan informasi berbeda-beda sesuai wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Semakin rendah informasi kegiatan yang rincidan tingkat manajemen yang melakukan operasi maka semakin tinggi tingkat manajemen membutuhkan informasi yang lebih ringkas. Jika dihasilkan dari laporan keuangan yang berkualitas, informasi akuntansi yang dihasilkan juga akan berkualitas, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Tuntutan di bagian akuntansi yaitu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan. Bila manajemen sudah mempertimbangkan semua faktor maka manajemen akan mempunyai resiko kesalahan yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan

Pada permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah-masalah dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas pada Kabupaten

Padang Lawas. Pemerintah harus bertanggungjawab untuk menjadikan permasalahan ini sebagai perwujudan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu faktor yang dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan. Laporan keuangan disusun sebagai penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan operasional yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penerapan sistem informasi akuntansi ini ditempatkan dalam upaya untuk mencapai komputersasi dalam organisasi pemerintah agar lebih akurat., tepat dan komprehensif sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang berkualitas oleh pemakai laporan keuangan tersebut. Hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Intern (SPI) sangat penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, oleh karena itu. Pemerintah meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern ini juga akan berdampak pada opini BPK. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan memperluas lokasi penelitian dan memperluas objek penelitian

yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi keuangan koperasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan semakin baik sistem pengendalian internal yang ada maka koperasi simpan pinjam juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal (Triono & Dewi, 2020). Hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan adalah dimana entitas yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik akan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dari kesalahan salah saji (Setiawan, 2020). Lingkungan pengendalian internal ini membantu pengurus dan pengelola keuangan dalam menjaga asset, menjamin tersajinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, mengoptimalkan pemamfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien.

Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh

karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi urgen baik level pimpinan maupun staf pemerintahan (Zubaidi et al., 2019). Dalam menghasilkan laporan keuangan diperlukan adanya orang-orang yang berkompeten sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermamfaat dalam hal pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi saat ini semakin berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan dan teknologi yang semakin canggih dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan individu serta teknologi yang ada untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan di suatu perusahaan.

Berdasarkan dari persoalan yang di uraikan diatas maka peneliti dalam skripsi ini merumuskan judul yakni **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Padang Lawas”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat kelebihan belanja perjalanan dinas pada SKPD Kabupaten Padang Lawas.
2. Terdapat Kekurangan volume paket pekerjaan belanja modal pada SKPD Kabupaten Padang Lawas.
3. Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial tidak sesuai ketentuan modal pada SKPD Kabupaten Padang Lawas.
4. Pengelolaan dan penatausahaan asset tetap belum tertib pada SKPD Kabupaten



Padang Lawas.

5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai dimana adanya perencanaan kegiatan tidak memadai pada SKPD Kabupaten Padang Lawas.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan batasan masalahnya, yaitu:

1. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kinerja pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Padang Lawas.
2. Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Padang Lawas.
3. Pada penelitian ini data dan informasi hanya pada laporan keuangan yang terdapat pada SKPD Kabupaten Padang Lawas.

### 1.4 Rumusan Masalah

Sesuai uraian identifikasi masalah diatas, peneliti membuat rumusan masalah antara lain:

1. Apakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?
3. Apakah Kinerja Pegawai berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan ?
4. Apakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Kinerja Pegawai berpengaruh terhadap laporan keuangan ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas oleh karena itu dapat dijelaskan beberapa tujuan penelitian berikut ini:

1. Menganalisis dan mengetahui Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Menganalisis dan mengetahui apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Menganalisis dan mengetahui apakah kinerja pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Menganalisis dan mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi, pengendalian internal dan kinerja pegawai secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Bagi akademis

Hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi yang tentunya dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan. tentang sejumlah variabel yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah daerah

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan masukan tentang pelaksanaan penerapan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kinerja pegawai, sehingga dapat meningkatkan kinerja manajerial pada pemerintah daerah.

### 3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama peneliti dimasa mendatang yang tertarik melakukan penelitian serupa dengan yang dibahas didalam penelitian ini.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY